

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Lembaga pemerintahan sebagai organisasi nir laba mempunyai tujuan bukan mencari kepentingan tetapi semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misal peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dengan menyampaikan Laporan Keuangan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif

dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah adalah keuangan daerah (APBD). Jika keuangan daerah merupakan salah satu sistem utama dalam pengelolaan pemerintah daerah, maka pengelolaan APBD adalah denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No:17/ 2003. Dalam UU No:32/2004 disebutkan juga bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan APBD yang berasal dari APBN, proses penyusunan APBD diatur dalam UU No:33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP NO:58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tuntutan yang paling tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada di didalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002:299).

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan Laporan Keuangan yang tersedia. Analisis rasio

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:121).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diambil adalah: “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali, jika dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008-2010?”.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada kinerja keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008-2010.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui posisi keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2008-2010.
- b. Mengetahui perbedaan kondisi keuangan di Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2008-2010.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi: Akuntansi Sektor Publik, Tinjauan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengukuran Anggaran Kinerja Keuangan Daerah. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Hasil Analisis Rasio.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran.